

LAPORAN PEMANTAUAN MANDIRI

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Transparency International Indonesia



MAKASSAR
MALANG
SEMARANG
PEKANBARU

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG.....	3
TUJUAN.....	4
METODOLOGI.....	4
HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS.....	5-7
KESIMPULAN.....	8
REKOMENDASI.....	8
LAMPIRAN.....	9
DAFTAR RESPONDEN.....	9
DAFTAR PERTANYAAN.....	10
- DEMOGRAFI.....	10
- PERIZINAN DAN TATA NIAGA.....	11-12
- KEUANGAN NEGARA	13-16
- PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI.....	17-19
- HASIL STUDI DAERAH.....	20
1. Makassar.....	20
2. Malang.....	21
3. Semarang.....	22
4. Pekanbaru.....	23

LATAR BELAKANG

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan (selanjutnya disebut Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK tersebut merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (selanjutnya disebut Perpres Stranas PPK), Perpres Stranas PK digadagadag sebagai upaya percepatan sinergi antikorupsi yang terfokus di Pemerintahan. Pada Perpres Stranas PK 2018 ini terdapat tiga fokus pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Berbeda dengan Perpres Stranas PPK sebelumnya, Perpres Stranas PK 2018 menampilkan upaya sinergitas antar lembaga negara. Dibentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam implementasinya, Perpres Stranas PK 2018 juga akan diturunkan melalui Rencana Aksi Nasional dan kemudian tentu juga akan diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RAN dan RAD PK) sesuai mandat dalam Peraturan tersebut. Sehingga Strategi Nasional yang sudah dirancang tersebut bisa untuk dijalankan oleh kementerian dan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Pada saat yang berbeda, Transparency International Indonesia telah melakukan serangkaian diskusi baik pada tingkat nasional maupun di daerah dalam upaya mendukung implementasi Perpres Stranas PK 2018 ini. Adapun temuan-temuan yang berhasil dihimpun antara lain adalah bahwa pada tahap penyusunan, implementasi dan monitoring Perpres Stranas PPK sebelumnya di beberapa daerah, pihak Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pihak yang terdampak. Sehingga dalam implementasinya Perpres Stranas PPK sebelumnya dapat dikatakan hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja. Selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan terkait Perpres Stranas PPK sebelumnya, menyebabkan masyarakat tidak tahu akan keberadaan RAN dan RAD PPK, sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap Stranas PPK yang terdahulu.

Terkait adanya Perpres Stranas PK 2018 yang baru, masyarakat berharap adanya sosialisasi yang gencar dan pengembangan model partisipasi publik untuk mendukung keberhasilan Perpres Stranas PK 2018 yang baru.

TUJUAN



Untuk dapat melihat sejauh mana implementasi Stranas PK, baik di aras nasional/pusat maupun di daerah.



Untuk memberikan masukan terkait temuan-temuan dalam pemantauan Stranas PK kepada para pihak, terutama Timnas PK

METODOLOGI

Pemantauan dilakukan oleh Transparency International Indonesia bersama sejumlah CSO di daerah. Pemantauan dilakukan pada medio Maret hingga April 2019.

KOTA	CSO
Pekanbaru	Senarai Pekanbaru
Malang	Malang Corruption Watch
Semarang	Pattiro Semarang
Makassar	ACC Makassar

Sejumlah CSO di daerah tersebut diberikan sebuah alat untuk mengetahui dan mengukur sejauhmana Stranas PK di daerah diterapkan. Alat tera mandiri yang digunakan dalam pemantauan independen ini terdiri dari tiga klaster dan enam dimensi:

KLASTER	DIMENSI
Risiko Korupsi	■ Potensi Korupsi
	■ Dampak Korupsi
Partisipasi Masyarakat Sipil	■ Akses Masyarakat
	■ Kapasitas Masyarakat
Dampak Antikorupsi	■ Program Antikorupsi
	■ Capaian Program Antikorupsi

Sumber data yang digunakan dalam memberikan penilaian ini adalah persepsi, pengalaman dan ekspektasi dari CSO kepada keberadaan Stranas PK, data dan informasi media massa dan media sosial, dan wawancara mendalam berbagai pihak yang dianggap sebagai ahli.

ANGKA	KETERANGAN
0	Tidak ada
1	Sangat rendah
2	Cenderung rendah
3	Cenderung tinggi
4	Sangat tinggi

Data dan informasi yang diperoleh dikuantifikasi dalam kategori angka-angka sesuai metodologi di atas. Sehingga dalam hasilnya akan memberikan gambaran yang diarahkan pada tujuan.

HASIL PEMANTAUAN DAN ANALISIS

KLASTER	DIMENSI	RERATA
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	3.82
	Dampak Korupsi	3.93
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	1.47
	Kapasitas Masyarakat Sipil	2.41
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	2.20
	Capaian Program Antikorupsi	3.04

RISIKO KORUPSI



Dari hasil ini nampak bahwa masyarakat menilai bahwa risiko korupsi dianggap tinggi. Risiko korupsi yang tinggi meliputi pada tiga fokus area yang terdapat dalam Stranas PK. Jika dilihat dalam dua dimensi penyusun risiko korupsi dampak korupsi mempunyai rerata 3.93 dan pada potensi korupsi sebesar 3.82. Ini menandakan potensi dan dampak korupsi masih dinilai sangat tinggi (mendekati angka 4). Dengan kata lain, risiko korupsi yang terdapat dalam tiga fokus area Stranas PK dianggap sangat tinggi.



PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL



Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil masih dianggap sangat rendah. Partisipasi masyarakat yang terdiri dari akses dan kapasitas sangat rendah. Di mana akses masyarakat sipil terhadap kebijakan antikorupsi, Stranas PK khususnya hanya 1.47 poin dan kapasitas masyarakat sipil dalam keterlibatannya adalah 2.41 poin. Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Stranas PK dianggap masih sangat rendah.

DAMPAK ANTIKORUPSI

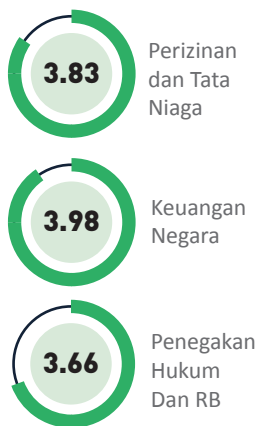


Namun masyarakat sipil menilai keberadaan dampak program antikorupsi pada posisi yang cenderung rendah. Hal ini terlihat dari meski masyarakat menilai program antikorupsi cenderung rendah, akan tetapi untuk capaian programnya dinilai cenderung tinggi. Di mana program antikorupsi mempunyai rerata 2.20 poin dan capaian program antikorupsi adalah 3.04 poin.

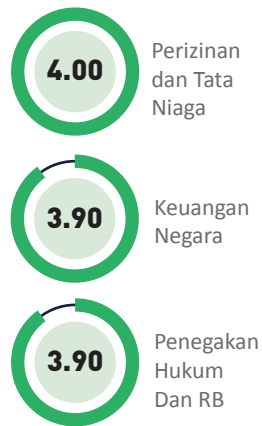
KLASTER	DIMENSI	PERIZINAN DAN TATA NIAGA	KEUANGAN NEGARA	PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	3.83	3.98	3.66
	Dampak Korupsi	4	3.9	3.9
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	1.85	1.7	0.85
	Kapasitas Masyarakat Sipil	1.91	2.41	2.91
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	2	2.47	2.13
	Capaian Program Antikorupsi	3	3	3.13
Rerata		2.77	2.86	2.76

RISIKO KORUPSI

Potensi Korupsi



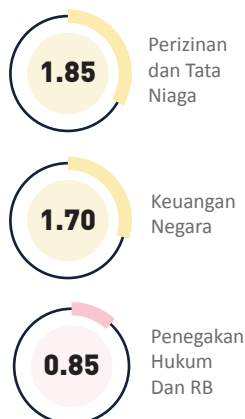
Dampak Korupsi



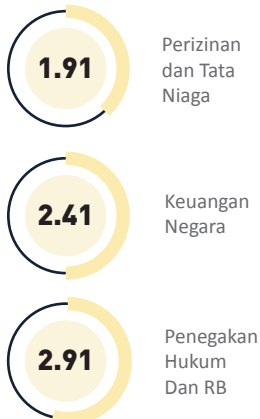
Dari diagram di atas, diketahui bahwa risiko korupsi pada fokus keuangan negara (3.98) paling tinggi dibandingkan dengan risiko korupsi pada fokus perizinan dan tata niaga (3.83) serta pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi (3.66). Hal ini berarti bahwa potensi dan dampak korupsi pada fokus keuangan negara dianggap penting untuk diperbaiki.

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL

Akses Masyarakat



Kapasitas Masyarakat

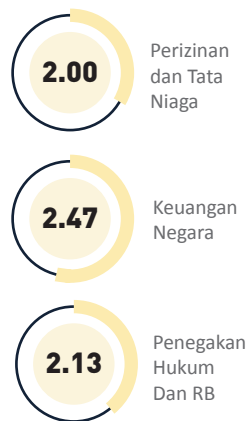


Di sisi lain, dalam hal partisipasi masyarakat sipil, akses masyarakat sipil paling rendah pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi (0.85). Sedangkan akses masyarakat pada sektor perizinan dan keuangan negara relatif lebih baik. Masing-masing pada rerata 1.85 dan 1.70 poin.

Berbanding terbalik dengan akses masyarakat sipil, pada sisi kapasitas masyarakat sipil, pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi, **menurut masyarakat sipil mempunyai rerata tertinggi (2.91). Lebih baik dibandingkan pada fokus keuangan negara (2.41) serta perizinan dan tata niaga (1.91).**

DAMPAK ANTIKORUPSI

Program Antikorupsi



Capaian Program Antikorupsi



Dalam klaster dampak antikorupsi, **capaian program antikorupsi pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi memperoleh rerata paling tinggi (3.13).** Hal ini berarti capaian program antikorupsi layak mendapat apresiasi. Di mana masyarakat merasakan capaian program antikorupsi bisa sangat optimal jika masyarakat merasakan dampaknya langsung.

KESIMPULAN

Dari temuan di atas, hingga laporan ini diselesaikan, maka bisa ditarik kesimpulan:

1. Masyarakat menilai risiko korupsi tertinggi ada pada fokus perizinan dan tata niaga. Sehingga diperlukan upaya yang terukur untuk mencegah dan mengatasi korupsi pada fokus perizinan dan tata niaga.
2. Partisipasi masyarakat sipil terbesar pada kontribusinya di sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kapasitas masyarakat dinilai cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas masyarakat di sektor lain dan juga lebih baik jika dibandingkan dengan akses masyarakat sipil pada ketiga sektor fokus isu yang ada dalam Stranas PK
3. Masyarakat menilai dampak antikorupsi yang paling bisa dirasakan adalah pada program-program dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi apabila tercapai, maka masyarakat menganggap problem korupsi akan cenderung lebih baik untuk diatasi.

REKOMENDASI

Dari paparan di atas maka Transparency International Indonesia memandang perlu untuk meneruskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ketiga fokus dalam Stranas PK perlu diukur dari sisi Pemerintah untuk kemudian disesuaikan/diselaraskan dengan dampak bagi masyarakat. Mengingat masyarakat adalah penerima manfaat sekaligus penerima dampak dalam setiap program lembaga negara.
2. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi terhadap program dan capaian dari Stranas secara reguler. Sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat berimbang dan jelas sasaran dan tujuannya. Untuk kemudian masyarakat merasakan dampak dari Stranas PK tersebut.

LAMPIRAN

DAFTAR RESPONDEN

Makassar

1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Makassar
2. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar
3. Anti-Corruption Committee (ACC) Makassar
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK)
5. Lembaga Pemantau Independen Pengadaan barang dan Jasa (LPI PBJ) Makassar
6. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Makassar
7. Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Sulsel
8. Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi
9. Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM) UMI Makassar
10. Forum Study Isu-isu Strategis (FOSIS) Makassar
11. Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARS Sulsel)
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Semarang

1. Pattiro Semarang
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak
3. Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Semarang
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Serat ID
5. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Semarang
6. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang
7. JAKER HAM
8. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)
9. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang
10. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang
11. Pattiro Kendal
12. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang

Malang

1. Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK)
2. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)
3. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Malang
4. Nawakalam Kota Batu
5. Malang Corruption Watch (MCW)
6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang
7. Woman Crisis Centre (WCC) Malang
8. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang
9. Omah Rakyat Malang
10. Pattiro Malang
11. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Malang

Pekanbaru

1. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI)
2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru
4. SENARAI Pekanbaru
5. Akademisi
6. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru
7. Gerakan Riau AntiKorupsi (GRASI)
8. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Pekanbaru
9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pekanbaru

DAFTAR PERTANYAAN

DEMOGRAFI

	1	2	3			4
1. Fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi	Perizinan dan tata niaga	Kuangan negara	Penegakan hukum dan reformasi birokrasi			Semuanya
	A	B	C	D	E	F
2. Fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada perizinan dan tata niaga berikut	Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal	Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan	Utilisasi Nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi	Integrasi sinkronisasi data impor pangan strategis	Penerapan manajemen antisuap di Pemerintah dan swasta	Semuanya
	G	H	I			J
3. Fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada keuangan negara berikut	Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik	Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan nonpajak			Semuanya
	K	L	M			N
4. Fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada reformasi birokrasi dan penegakan hukum berikut	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa	perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana			Semuanya

PERIZINAN DAN TATA NIAGA

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Potensi Korupsi	Seberapa besar kemungkinan korupsi dalam perizinan dan tata niaga melibatkan aktor-aktor nasional dan lokal baik politisi, birokrat, bisnis, penegak hukum dan/atau lainnya?						
	Seberapa besar potensi korupsi di sektor Wilayah Operasi Perizinan dan Tata Niaga						
	Seberapa besar potensi korupsi di sektor Anggaran yang meliputi Investasi, Penerimaan, dan Belanja						
	Seberapa besar potensi korupsi di sektor Penerbitan Izin, konsesi dan sejenisnya						
	Seberapa besar potensi korupsi di sektor Pengawasan atas Kepatuhan Pemegang Izin, Pengawasan Pendapatan Pemerintah, Pelaporan Pengembalian Biaya produksi yang Diganti oleh Pemerintah						
	Seberapa besar potensi korupsi di sektor Penegakan Hukum terhadap fraud yang dilakukan oleh kontraktor, pemenang tender yang Bermasalah, dan Pencabutan Izin Usaha						
	Sub total					0	
	Rata-rata					0	
Dampak Korupsi	Seberapa besar dampak tata kelola yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Seberapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Sub total					0	
	Rata-rata					0	
	Apakah masyarakat sipil terlibat dalam perumusan rencana aksi PK di daerah?						
	Apakah pemerintah daerah mengalokasikan dukungan finansial yang cukup terkait rencana aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam implementasi aksi daerah PK?						

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Akses Masyarakat	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan realisasi aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat terlibat dalam proses penegakan hukum kasus korupsi di daerah?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Kapabilitas Masyarakat	Apakah terdapat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, mendapatkan informasi publik, mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan akses sumber ekonomi, jaminan sosial, jaminan rasa aman, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan?						
	Apakah warga atau perwakilan masyarakat sipil dilibatkan, terwadahi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah semua kelompok masyarakat sipil memiliki mekanisme yang efektif dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah terdapat relasi yang baik antar masyarakat sipil dalam mengembangkan jejaring dan pertukaran informasi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sumber daya yang memadai dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sistem pemantauan internal kualitas partisipasi masyarakat dalam Aksi PK Daerah?						
	Apakah terdapat masyarakat sipil yang fokus dalam upaya advokasi isu antikorupsi, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, pemenuhan informasi publik, layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), akses ekonomi, dan kepastian hukum. Jaminan sosial, kesetaraan gender?						

KEUANGAN NEGARA

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Potensi Korupsi	Seberapa besar kemungkinan korupsi dalam keuangan negara melibatkan aktor-aktor nasional dan lokal baik politisi, birokrat, bisnis, penegak hukum dan/atau lainnya?						
	Seberapa besar potensi korupsi terjadi ketika tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat						
	Seberapa besar potensi korupsi terjadi ketika tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah						
	Seberapa besar potensi korupsi terjadi ketika tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dengan tingkat daerah dan sebaliknya						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi pada Penilaian/Penentuan Kebutuhan Pelaksanaan Pengadaan dan Penggunaan Jasa Konsultan dalam tahap Penilaian/ Penentuan Kebutuhan						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi pada Persiapan Perancangan & Persiapan Dokumen Tender, Keterlibatan dalam Tahap Pra-Kualifikasi Dokumen Tender, dan Pemantauan Spesifikasi Barang/Jasa						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi pada Seleksi Peserta Tender, Penentuan Pemenang Tender, dan Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi pada tidak terlaksananya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi jika tidak terintegrasinya sistem administrasi perpajakan						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi jika tidak terintegrasinya sistem administrasi non-pajak						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Dampak Korupsi	Seberapa besar dampak tata kelola yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
	Seberapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Akses Masyarakat	Apakah masyarakat sipil terlibat dalam perumusan rencana aksi PK di daerah?						
	Apakah pemerintah daerah mengalokasikan dukungan finansial yang cukup terkait rencana aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam implementasi aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan realisasi aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat terlibat dalam proses penegakan hukum kasus korupsi di daerah?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Kapabilitas Masyarakat	Apakah terdapat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, mendapatkan informasi publik, mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan akses sumber ekonomi, jaminan sosial, jaminan rasa aman, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan?						
	Apakah warga atau perwakilan masyarakat sipil dilibatkan, terwadahi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah semua kelompok masyarakat sipil memiliki mekanisme yang efektif dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah terdapat relasi yang baik antar masyarakat sipil dalam mengembangkan jejaring dan pertukaran informasi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sumber daya yang memadai dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sistem pemantauan internal kualitas partisipasi masyarakat dalam Aksi PK Daerah?						

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
	Apakah terdapat masyarakat sipil yang fokus dalam upaya advokasi isu antikorupsi, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, pemenuhan informasi publik, layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), akses ekonomi, dan kepastian hukum. Jaminan sosial, kesetaraan gender?						
	Apakah masyarakat sipil dapat secara aktif mempengaruhi, memantau, memfasilitasi beragam kepentingan, memiliki kontribusi konkrit terhadap pemenuhan hak dasar warga?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Program Antikorupsi	Apakah Program Antikorupsi Menjawab Problem Korupsi?						
	Apakah Realisasi program antikorupsi sesuai dengan rencana?						
	Anggaran program tidak sesuai dengan anggaran						
	Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong program antikorupsi lain						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Capaian Program Antikorupsi	Apakah terjadi : a. Teroptimalisasinya tata kelola penerimaan negara secara transparan dan akuntabel, b. Meningkatnya kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan, c. Terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi.						
	Apakah terjadi: a. Mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan, b. meningkatinya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa, c. Meningkatnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
	Total Skor					0	
	Total Rata-rata Skor					0	

Maksimum skore : 128

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
	Apakah masyarakat sipil dapat secara aktif mempengaruhi, memantau, memfasilitasi beragam kepentingan, memiliki kontribusi konkrit terhadap pemenuhan hak dasar warga?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Program Antikorupsi	Apakah Program Antikorupsi Menjawab Problem Korupsi?						
	Apakah Realisasi program antikorupsi sesuai dengan rencana?						
	Anggaran program tidak sesuai dengan anggaran						
	Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong program antikorupsi lain						
						0	
						0	
Capaian Program Antikorupsi	Seberapa besar: a. simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan. b. percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah; c. pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah						
	Seberapa besar pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan b. penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Layanan perizinan di pusat maupun daerah, c. Menguatnya upaya pencegahan korupsi di dunia usaha						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
	Total Skor					0	
	Rata-rata Skor					0	

Maksimum skore : 112

PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Potensi Korupsi	Seberapa besar kemungkinan korupsi dalam penegakan hukum dan birokrasi yang melibatkan aktor-aktor nasional dan lokal baik politisi, birokrat, bisnis, penegak hukum dan/atau lainnya?						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi terjadi belum optimalnya koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara?						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi penyelewengan dalam penegakan hukum?						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi akibat lemahnya independensi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga dan pemda						
	Seberapa besar kemungkinan korupsi lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik?						
	seberapa besar kemungkinan korupsi akibat tidak ada regulasi tentang strategi nasional pengawasan keuangan desa						
	seberapa besar kemungkinan korupsi akibat Belum optimalnya kinerja aparatur desa						
	seberapa besar kemungkinan korupsi akibat Penyelewengan implementasi keuangan desa						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Dampak Korupsi	Seberapa besar dampak tata kelola yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Seberapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
	Apakah masyarakat sipil terlibat dalam perumusan rencana aksi PK di daerah?						
	Apakah pemerintah daerah mengalokasikan dukungan finansial yang cukup terkait rencana aksi daerah PK?						

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Akses Masyarakat	Apakah masyarakat dilibatkan dalam implementasi aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan realisasi aksi daerah PK?						
	Apakah masyarakat terlibat dalam proses penegakan hukum kasus korupsi di daerah?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Kapabilitas Masyarakat	Apakah terdapat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, mendapatkan informasi publik, mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan akses sumber ekonomi, jaminan sosial, jaminan rasa aman, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan?						
	Apakah warga atau perwakilan masyarakat sipil dilibatkan, terwadahi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah semua kelompok masyarakat sipil memiliki mekanisme yang efektif dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah terdapat relasi yang baik antar masyarakat sipil dalam mengembangkan jejaring dan pertukaran informasi dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sumber daya yang memadai dalam perumusan Aksi PK Daerah?						
	Apakah masyarakat sipil memiliki sistem pemantauan internal kualitas partisipasi masyarakat dalam Aksi PK Daerah?						
	Apakah terdapat masyarakat sipil yang fokus dalam upaya advokasi isu antikorupsi, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, pemenuhan informasi publik, layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), akses ekonomi, dan kepastian hukum. Jaminan sosial, kesetaraan gender?						
	Apakah masyarakat sipil dapat secara aktif mempengaruhi, memantau, memfasilitasi beragam kepentingan, memiliki kontribusi konkret terhadap pemenuhan hak dasar warga?						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
	Apakah Program Antikorupsi Menjawab Problem Korupsi?						
	Apakah Realisasi program antikorupsi sesuai dengan rencana?						

DIMENSI	INDIKATOR	SKOR					NOTE
		Tidak Ada	Sangat Rendah	Cenderung Rendah	Cenderung Tinggi	Sangat Tinggi	
		0	1	2	3	4	
Program Antikorupsi	Anggaran program tidak sesuai dengan anggaran						
	Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong program antikorupsi lain						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
Capaian Program Antikorupsi	Seberapa besar penguatan upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem berbasis informasi, meliputi: a. percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi. b. pengembangan sistem informasi lintas lembaga Penegak Hukum. c. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum. d. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Seberapa besar: a. penguatan implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah, dan terpadu, b. terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (open government) dalam manajemen pemerintahan.						
	Sub Total					0	
	Rata-rata					0	
	Total Skor					0	
	Rata-rata Skor					0	

Maksimum skore : 128

Penilaian Program Pencegahan Korupsi

ALAT TERA MANDIRI

1. Di antara hal-hal berikut, apakah fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi berikut?
 - A. Perizinan dan Tata Niaga
 - B. Keuangan Negara
 - C. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
 - D. Semuanya

RISIKO KORUPSI POTENSI VS AKIBAT

Perizinan dan Tata Niaga

2. Di antara hal-hal berikut, fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada perizinan dan tata niaga berikut?
 - A. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal
 - B. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan
 - C. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
 - D. Integrasi sinkronisasi data impor pangan strategis
 - E. Penerapan manajemen antisuap di Pemerintah dan swasta
 - F. Semuanya
3. Seberapa besar kemungkinan korupsi dalam perizinan dan tata niaga melibatkan aktor-aktor nasional dan lokal baik politisi, birokrat, bisnis, penegak hukum dan/atau lainnya?
 - A. Korupsi membentuk jejaring yang kuat antar kelompok politisi, birokrat, atau pengusaha lokal maupun nasional
 - B. Korupsi hanya melibatkan oknum politisi, birokrat, atau pengusaha baik nasional maupun lokal.
4. Di antara hal-hal berikut, apa saja potensi korupsi yang lazim terjadi di sektor Perizinan dan Tata Niaga? **(pilih 3 potensi korupsi yang paling mungkin terjadi)**
 - A. Penentuan wilayah operasi Perizinan dan Tata Niaga
 - B. Transparansi anggaran yang meliputi investasi, penerimaan, dan belanja
 - C. Penerbitan izin, konsesi dan sejenisnya
 - D. Pengawasan atas kepatuhan pemegang izin, pengawasan pendapatan Pemerintah, pelaporan pengembalian biaya produksi yang diganti oleh Pemerintah
 - E. Penegakan hukum terhadap *fraud* yang dilakukan oleh kontraktor, pemenang tender yang bermasalah, dan pencabutan izin usaha
 - F. Lainnya, sebutkan _____

5. Seberapa besar kemungkinan prevalensi kejadian korupsi tersebut
 - A. Pasti terjadi
 - B. Sangat mungkin terjadi
 - C. Kecil Kemungkinan terjadi
 - D. Tidak mungkin terjadi
6. Jika praktik koruptif tersebut terjadi, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan?
 - A. Sangat merusak
 - B. Jika ada kerusakan, dapat dikompromikan
 - C. Jika ada kerusakan, dapat pulih secara cepat
 - D. Tidak merusak
7. Seberapa luas dampak yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
 - A. Berdampak pada sebagian besar populasi dan atau skala nasional
 - B. Berdampak pada beberapa orang
 - C. Berdampak pada sedikit orang
 - D. Tidak ada dampak
8. Seberapa besar kerugian dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
 - A. Diatas 1 Milyar Rupiah
 - B. 500 Juta - 1 Milyar Rupiah
 - C. 100 Juta - 499 Juta Rupiah
 - D. Di bawah 99 juta Rupiah

Keuangan Negara

9. Di antara hal-hal berikut, fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada keuangan negara berikut?
 - A. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
 - B. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa
 - C. Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak
 - D. Semuanya
10. Seberapa besar kemungkinan korupsi dalam keuangan negara melibatkan aktor-aktor nasional dan lokal baik politisi, birokrat, bisnis, penegak hukum dan/atau lainnya?
 - A. Korupsi membentuk jejaring yang kuat antar kelompok politisi, birokrat, atau pengusaha lokal maupun nasional
 - B. Korupsi hanya melibatkan oknum politisi, birokrat, atau pengusaha baik nasional maupun lokal.
11. Menurut Anda, apa saja praktik korupsi yang mungkin terjadi sektor sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik? (Pilih 3 Praktik Koruptif yang Paling Mungkin Terjadi)

- A. Tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat
- B. Tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah
- C. Tidak berfungsinya koneksi antar sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dengan tingkat daerah dan sebaliknya
- D. Tidak terselenggaranya trilateral anggaran dan kinerja di K/L/OPD
- E. Lainnya, sebutkan _____
- F. Semuanya

12. Menurut Anda, apa saja praktik korupsi yang mungkin terjadi sektor pengadaan barang dan jasa? (Pilih 3 Praktik Koruptif yang Paling Mungkin Terjadi)

- A. Penilaian/penentuan kebutuhan pelaksanaan pengadaan dan penggunaan jasa konsultan dalam tahap penilaian/penentuan kebutuhan
- B. Persiapan perancangan & persiapan dokumen tender, keterlibatan dalam Tahap pra-kualifikasi dokumen tender, dan pemantauan spesifikasi barang/jasa
- C. Seleksi Peserta Tender, Penentuan Pemenang Tender, dan Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan
- D. Pengaduan proses tender, pengawasan konflik kepentingan, dan pelaporan keuangan & audit
- E. *Blacklist* kepada perusahaan yang melakukan suap/korupsi, penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak bekerja sesuai dengan kontrak, dan penilaian/penentuan kebutuhan pelaksanaan pengadaan
- F. Lainnya, sebutkan _____
- G. Semuanya

13. Menurut Anda, apa saja praktik korupsi yang mungkin terjadi sektor penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak? (Pilih 3 praktik koruptif yang paling mungkin terjadi)

- A. Tidak terlaksananya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan
- B. Tidak terintegrasinya sistem administrasi perpajakan
- C. Tidak terintegrasinya sistem administrasi non-pajak
- D. Tidak terlaksananya pencegahan *tax avoidance and evasion*
- E. Tidak terbentuknya *National Data Repository*
- F. Lainnya, sebutkan _____
- G. Semuanya

14. Seberapa besar kemungkinan prevalensi kejadian korupsi tersebut

- A. Pasti terjadi
- B. Sangat mungkin terjadi
- C. Kecil Kemungkinan terjadi
- D. Tidak mungkin terjadi

15. Jika praktik koruptif tersebut terjadi, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan?

- A. Sangat merusak
- B. Jika ada kerusakan, dapat dikompromikan

- C. Jika ada kerusakan, dapat pulih secara cepat
- D. Tidak merusak

16. Seberapa luas dampak yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
- A. Berdampak pada sebagian besar populasi dan atau skala nasional
 - B. Berdampak pada beberapa orang
 - C. Berdampak pada sedikit orang
 - D. Tidak ada dampak
17. Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
- A. Diatas 1 Milyar Rupiah
 - B. 500 Juta - 1 Milyar Rupiah
 - C. 100 Juta - 499 Juta Rupiah
 - D. Di bawah 99 juta Rupiah

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

18. Di antara hal-hal berikut, fokus organisasi Anda saat ini dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi berikut?
- A. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - B. Implementasi *grand design* strategi pengawasan keuangan desa
 - C. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana
 - D. Semuanya
19. Menurut Anda, apa saja praktik korupsi yang lazim terjadi sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi? (Pilih 3 praktik koruptif yang paling sering terjadi)
- A. Belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara?
 - B. Penyelewengan dalam penegakan hukum?
 - C. Lemahnya independensi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah
 - D. Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik?
 - E. Lainnya, sebutkan _____
20. Menurut Anda, apa saja praktik korupsi yang lazim terjadi sektor pengawasan keuangan desa? (Pilih 3 Praktik Koruptif yang paling sering terjadi)
- A. Tidak ada regulasi tentang strategi nasional pengawasan keuangan desa
 - B. Belum optimalnya kinerja aparatur desa?
 - C. Penyelewengan implementasi keuangan desa?
 - D. Tidak adanya partisipasi masyarakat dan kanal pengaduan secara terpadu
 - E. Lemahnya pengawasan internal dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa?
 - F. Lainnya, sebutkan _____

21. Seberapa besar kemungkinan prevalensi kejadian korupsi tersebut
- A. Pasti terjadi
 - B. Sangat mungkin terjadi
 - C. Kecil Kemungkinan terjadi
 - D. Tidak mungkin terjadi
22. Jika praktik koruptif tersebut terjadi, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan?
- A. Sangat merusak
 - B. Jika ada kerusakan, dapat dikompromikan
 - C. Jika ada kerusakan, dapat pulih secara cepat
 - D. Tidak merusak
23. Seberapa luas dampak yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
- A. Berdampak pada sebagian besar populasi dan atau skala nasional
 - B. Berdampak pada beberapa orang
 - C. Berdampak pada sedikit orang
 - D. Tidak ada dampak
24. Seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas praktik korupsi tersebut?
- A. Diatas 1 Milyar Rupiah
 - B. 500 Juta - 1 Milyar Rupiah
 - C. 100 Juta - 499 Juta Rupiah
 - D. Di bawah 99 juta Rupiah

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL
(AKSES VS KAPASITAS)

25. Siapa saja mitra yang Anda libatkan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di daerah anda?
- A. Timnas PK: KPK, KSP, Bappenas, Kemendagri, KemenPAN RB
 - B. K/L terkait seperti: Kemenhut, Kemen ESDM, Kemenkeu, KemenBUMN, dll
 - C. Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) dan OPD
26. Di antara hal-hal berikut, apa saja upaya advokasi yang organisasi Anda lakukan terkait dengan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di daerah Anda?
- A. Mengupayakan pencegahan korupsi masuk dalam prioritas daerah
 - B. Mengusahakan pencegahan korupsi berkontribusi positif terhadap peningkatan aliran keuangan dan distribusi sumber daya ekonomi daerah
 - C. Berupaya agar program pencegahan korupsi mendorong sumber ekonomi daerah dikelola dengan baik
 - D. Melakukan upaya pengawasan kesesuaian dengan aturan yang berlaku
 - E. Memastikan upaya penegakan aturan diberlakukan secara konsisten
 - F. Lainnya, sebutkan _____

27. Di antara hal-hal berikut, Apa yang menggambarkan jenis partisipasi yang Anda lakukan dalam upaya advokasi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tersebut?
- A. Terinformasi
 - B. Terlibat
 - C. Berpendapat
 - D. Merumuskan
 - E. Memutuskan
28. Apakah terdapat kebijakan dan peraturan di daerah yang mendukung kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, mendapatkan informasi publik, mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan akses sumber ekonomi, jaminan sosial, jaminan rasa aman, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan?
- A. Tidak ada
 - B. Hanya ada sebagian kecil
 - C. Sebagian besar ada
 - D. Semuanya ada.
 - E. Lainnya, sebutkan _____
29. Di antara hal-hal berikut, apa saja bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat sipil di daerah?
- A. Dilibatkan dalam proses perumusan Aksi PK Daerah.
 - B. Terwadahi kepentingan dalam perumusan Aksi PK Daerah.
 - C. Memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang efektif dalam perumusan Aksi PK Daerah.
 - D. Memiliki sistem pemantauan internal kualitas partisipasi masyarakat dalam Aksi PK Daerah.
30. Di antara hal-hal berikut, Apakah masyarakat sipil di daerah mendorong penerapan kebebasan pendapat dan berserikat, mendapatkan informasi publik, mendapatkan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan akses sumber ekonomi, jaminan sosial, jaminan rasa aman, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan??
- A. Tidak ada
 - B. Hanya ada sebagian kecil
 - C. Sebagian besar ada
 - D. Semuanya ada.
31. Di antara hal-hal berikut, apa sajakah kapasitas yang dimiliki dalam advokasi masyarakat sipil di daerah?
- A. Mempengaruhi kebijakan publik.
 - B. Mampu menerjemahkan kebutuhan publik dalam rumusan kebijakan publik.
 - C. Mampu memfasilitasi keberagaman kepentingan dalam kebijakan publik.
 - D. Memiliki kontribusi konkrit terhadap pemenuhan hak dasar warga.

DAMPAK PROGRAM ANTIKORUPSI PROGRAM VS IMPACT

32. Di antara hal berikut, sejauh mana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi mampu Menjawab Problem Korupsi di daerah, memiliki perencanaan program yang terencana, dukungan anggaran program yang cukup, dan mampu mendorong program antikorupsi lain di sektor-sektor lain?
- A. Aksi Nasional Pencegahan Korupsi berjalan sporadis
 - B. Aksi Nasional Pencegahan korupsi terencana dengan baik, namun belum menimbulkan dampak signifikan bagi penurunan korupsi di daerah.
 - C. Aksi Nasional Pencegahan Korupsi terencana dengan baik dan efektif menurunkan korupsi di daerah.
33. Di antara hal-hal berikut, Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Bidang Perizinan dan Tata Niaga efektif melakukan (Pilih 3 Dampak yang terasa paling signifikan):
- A. Simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan.
 - B. Percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah.
 - C. Pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah;
 - D. Pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan
 - E. Penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan perizinan di pusat maupun daerah.
 - F. Menguatnya upaya pencegahan korupsi di dunia usaha
34. Di antara hal-hal berikut, Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Bidang Keuangan Negara efektif melakukan (Pilih 3 dampak yang terasa paling signifikan)
- A. Teroptimalisasinya tata kelola penerimaan negara secara transparan dan akuntabel.
 - B. Meningkatnya kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan.
 - C. Terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi.
 - D. Mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
 - E. Meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.
 - F. Meningkatnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
35. Di antara hal-hal berikut, Apakah Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Bidang Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi efektif melakukan (Pilih 3 Dampak Yang Terasa Paling Signifikan)

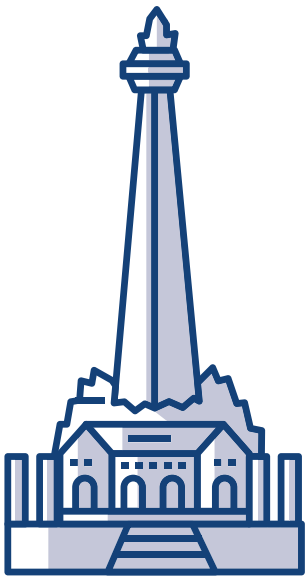
- A. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi
- B. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum.
- C. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.
- D. Semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah, dan terpadu.
- E. Terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (open government) dalam manajemen pemerintahan.

AREA ADVOKASI PARTISIPASI VS ORIENTASI

36. Di antara alasan berikut, mengapa masalah korupsi mendesak untuk diselesaikan di daerah Anda? **[Sebutkan 3 (tiga) alasan utamanya]**
- A. Menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - B. Menghambat kemudahan berusaha.
 - C. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - D. Mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan daerah.
 - E. Mengurangi kualitas belanja pemerintah daerah
 - F. Memperburuk kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, dan
 - G. Menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas birokrasi
 - H. Lainnya, sebutkan _____
37. Apa saja upaya advokasi yang organisasi Anda lakukan terkait dengan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di daerah Anda?
- A. Mengupayakan pencegahan korupsi masuk dalam prioritas daerah
 - B. Mengusahakan pencegahan korupsi berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah dan distribusi sumber daya ekonomi daerah
 - C. Berupaya agar program pencegahan korupsi mendorong tata kelola yang baik atas sumber-sumber ekonomi di daerah
 - D. Melakukan upaya pengawasan terhadap kepatuhan dengan aturan yang berlaku
 - E. Mendorong upaya penegakan aturan diberlakukan secara konsisten
 - F. Lainnya, sebutkan _____

MAKASSAR

HASIL STUDI DAERAH



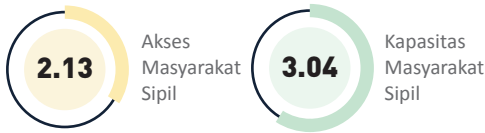
KLASTER	DIMENSI	PERIZINAN DAN TATA NIAGA	KEUANGAN NEGARA	PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI	RERATA
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	4.00	4.00	3.63	3.88
	Dampak Korupsi	4.00	4.00	4.00	4.00
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	2.80	2.60	1.00	2.13
	Kapasitas Masyarakat Sipil	3.00	2.88	3.25	3.04
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	2.50	2.25	2.25	2.33
	Capaian Program Antikorupsi	3.00	4.00	4.00	3.67
Rata-rata		3.22	3.09	3.02	

RISIKO KORUPSI



Risiko korupsi dianggap sangat tinggi. Risiko korupsi yang tinggi meliputi pada tiga fokus area yang terdapat dalam Stranas PK. Jika dilihat dalam dua dimensi penyusun risiko korupsi, dampak korupsi mempunyai rerata 4.00 dan pada potensi korupsi sebesar 3.88. Ini menandakan potensi dan dampak korupsi dinilai sangat tinggi (paling tinggi 4 poin).

PARTISIPASI MASYARAKAT



Partisipasi masyarakat sipil yaitu akses masyarakat sipil terhadap kebijakan antikorupsi, Stranas PK khususnya sebesar 2.13 poin dan kapasitas masyarakat sipil dalam keterlibatannya adalah 3.04 poin. Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sipil di Kota Makassar dalam Stranas PK di tiga fokus area dianggap cenderung tinggi.

DAMPAK ANTIKORUPSI



Program antikorupsi dan capaian program antikorupsi, masyarakat menilai program antikorupsi cenderung rendah, akan tetapi untuk capaian programnya dinilai cenderung tinggi. Di mana program antikorupsi mempunyai rerata 2.33 poin dan capaian program antikorupsi adalah 3.67 poin. Dengan demikian jika dihitung reratanya, maka dapat dikatakan bahwa dampak program antikorupsi di kota Makassar cenderung tinggi.

Potensi Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Kuangan Negara
3.63	Penegakan Hukum dan RB

Akses Masyarakat

2.80	Perizinan & Tata Niaga
2.60	Kuangan Negara
1.00	Penegakan Hukum dan RB

Program Antikorupsi

2.50	Perizinan & Tata Niaga
2.25	Kuangan Negara
2.25	Penegakan Hukum dan RB

- Sangat Tinggi
- Cenderung Tinggi
- Cenderung Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Ada

Dampak Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Kuangan Negara
4.00	Penegakan Hukum dan RB

Kapasitas Masyarakat

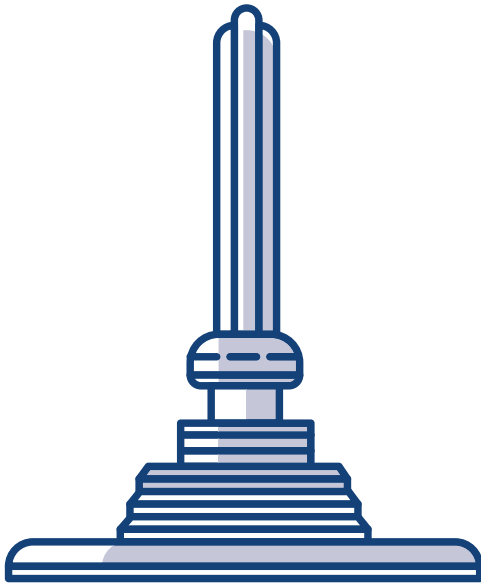
3.00	Perizinan & Tata Niaga
2.88	Kuangan Negara
3.25	Penegakan Hukum dan RB

Capaian Program Antikorupsi

3.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Kuangan Negara
4.00	Penegakan Hukum dan RB

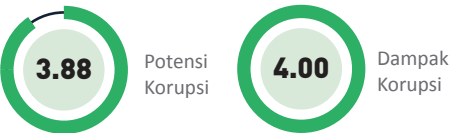
MALANG

HASIL STUDI DAERAH



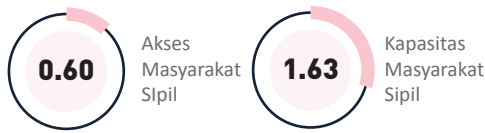
KLASTER	DIMENSI	PERIZINAN DAN TATA NIAGA	KEUANGAN NEGARA	PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI	RERATA
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	4.00	4.00	3.63	3.88
	Dampak Korupsi	4.00	4.00	4.00	4.00
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	1.00	1.00	1.00	0.60
	Kapasitas Masyarakat Sipil	2.00	0.88	2.00	1.63
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	1.50	1.25	1.50	1.42
	Capaian Program Antikorupsi	2.00	1.50	2.00	1.83
Rata-rata		2.42	2.10	2.35	

RISIKO KORUPSI



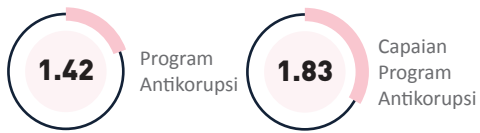
Risiko korupsi dianggap tinggi. Risiko korupsi yang tinggi meliputi pada tiga fokus area yang terdapat dalam Stranas PK. Jika dilihat dalam dua dimensi penyusun risiko korupsi dampak korupsi mempunyai rerata 4.00 dan pada potensi korupsi sebesar 3.88. Ini menandakan potensi dan dampak korupsi masih dinilai sangat tinggi (angka 4). Dengan kata lain, risiko korupsi yang terdapat dalam tiga fokus area Stranas PK dianggap sangat tinggi.

PARTISIPASI MASYARAKAT



Partisipasi masyarakat sipil masih dianggap sangat rendah. Partisipasi masyarakat yang terdiri dari akses dan kapasitas sangat rendah. Di mana akses masyarakat sipil terhadap kebijakan antikorupsi, Stranas PK khususnya hanya 0,60 poin dan kapasitas masyarakat sipil dalam keterlibatannya adalah 1,63 poin. Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Stranas PK dianggap masih sangat rendah.

DAMPAK ANTIKORUPSI



Dampak Program antikorupsi, masyarakat sipil menilai keberadaan dampak program antikorupsi pada posisi yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari poin program antikorupsi (1.42) dan pada capaian program antikorupsi pun hanya mendapat 1,83 poin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di kota malang, program antikorupsi dan capaiannya masih sangat rendah.

Potensi Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Kuangan Negara
3.63	Penegakan Hukum dan RB

Akses Masyarakat

1.00	Perizinan & Tata Niaga
1.00	Kuangan Negara
1.00	Penegakan Hukum dan RB

Program Antikorupsi

1.50	Perizinan & Tata Niaga
1.25	Kuangan Negara
1.50	Penegakan Hukum dan RB

- Sangat Tinggi
- Cenderung Tinggi
- Cenderung Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Ada

Dampak Korupsi

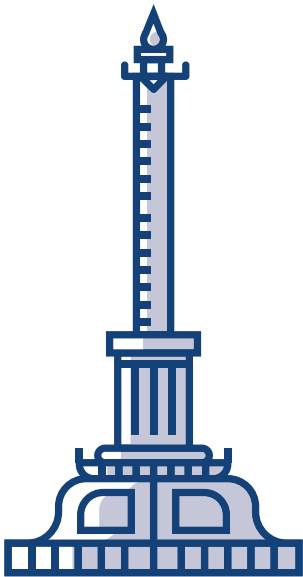
4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Kuangan Negara
4.00	Penegakan Hukum dan RB

Kapasitas Masyarakat

2.00	Perizinan & Tata Niaga
0.88	Kuangan Negara
2.00	Penegakan Hukum dan RB

Capaian Program Antikorupsi

2.00	Perizinan & Tata Niaga
1.50	Kuangan Negara
2.00	Penegakan Hukum dan RB



KLASTER	DIMENSI	PERIZINAN DAN TATA NIAGA	KEUANGAN NEGARA	PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI	RERATA
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	3.33	3.90	3.50	3.58
	Dampak Korupsi	4.00	3.60	3.60	3.73
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	0.40	1.80	0.00	0.73
	Kapasitas Masyarakat Sipil	0.00	1.80	2.75	1.52
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	2.25	3.00	2.23	2.49
	Capaian Program Antikorupsi	3.00	2.50	2.50	2.25

RISIKO KORUPSI



Risiko korupsi dianggap sangat tinggi. Risiko korupsi yang tinggi meliputi pada tiga fokus area yang terdapat dalam Stranas PK. Jika dilihat dalam dua dimensi penyusun risiko korupsi dampak korupsi mempunyai rerata 3.73 dan pada potensi korupsi sebesar 3.58. Ini menandakan potensi dan dampak korupsi masih dinilai sangat tinggi (mendekati angka 4). Dengan kata lain, risiko korupsi yang terdapat dalam tiga fokus area Stranas PK dianggap sangat tinggi. Dan perlu segera untuk diperbaiki.

PARTISIPASI MASYARAKAT



Partisipasi masyarakat sipil dianggap sangat rendah. Partisipasi masyarakat yang terdiri dari akses dan kapasitas masyarakat sipil, poin paling tinggi didapat pada kapasitas masyarakat sipil adalah 1,52. Sementara pada akses masyarakat sipil terhadap kebijakan antikorupsi, Stranas PK khususnya, hanya 0.73 poin. Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Stranas PK di Kota Semarang dianggap masih sangat rendah.

DAMPAK ANTIKORUPSI



Pada klaster dampak antikorupsi, masyarakat sipil menilai keberadaan dampak program antikorupsi pada posisi yang cenderung rendah. Hal ini terlihat dari dua komponen penyusunnya. Di mana pada program antikorupsi mempunyai rerata 2.49 poin sementara pada capaian program antikorupsi adalah 2.25 poin.

Potensi Korupsi

3.33	Perizinan & Tata Niaga
3.90	Kuangan Negara
3.50	Penegakan Hukum dan RB

Akses Masyarakat

0.40	Perizinan & Tata Niaga
1.80	Kuangan Negara
0.00	Penegakan Hukum dan RB

Program Antikorupsi

2.25	Perizinan & Tata Niaga
3.00	Kuangan Negara
2.23	Penegakan Hukum dan RB

- Sangat Tinggi
- Cenderung Tinggi
- Cenderung Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Ada

Dampak Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
3.60	Kuangan Negara
3.60	Penegakan Hukum dan RB

Kapasitas Masyarakat

0.00	Perizinan & Tata Niaga
1.80	Kuangan Negara
2.75	Penegakan Hukum dan RB

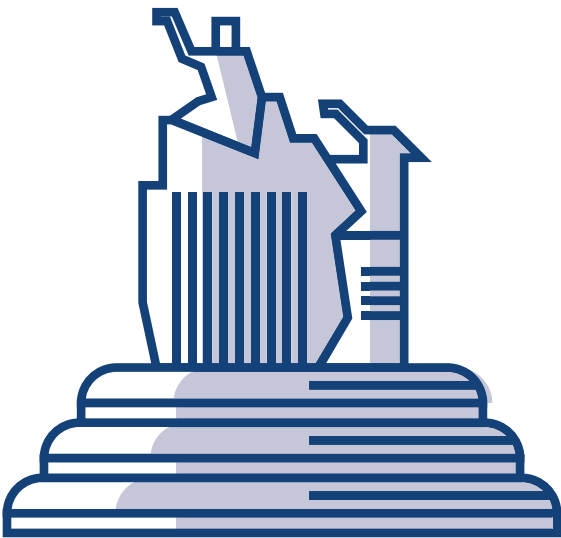
Capaian Program Antikorupsi

3.00	Perizinan & Tata Niaga
2.50	Kuangan Negara
2.50	Penegakan Hukum dan RB

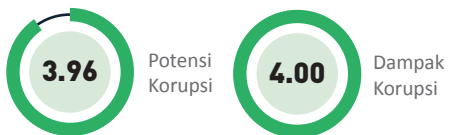
PEKANBARU

HASIL STUDI DAERAH

KLASTER	DIMENSI	PERIZINAN DAN TATA NIAGA	KEUANGAN NEGARA	PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI	RERATA
Risiko Korupsi	Potensi Korupsi	4.00	4.00	3.88	3.96
	Dampak Korupsi	4.00	4.00	4.00	4.00
Partisipasi Masyarakat Sipil	Akses Masyarakat Sipil	3.20	1.40	1.40	2.00
	Kapasitas Masyarakat Sipil	3.38	3.36	3.63	3.54
Dampak Antikorupsi	Program Antikorupsi	2.00	1.75	2.00	1.92
	Capaian Program Antikorupsi	4.00	4.00	4.00	4.00
Rata-Rata		3.43	3.13	3.15	



RISIKO KORUPSI



Masyarakat menilai bahwa risiko korupsi dianggap tinggi. Risiko korupsi yang tinggi meliputi pada tiga fokus area yang terdapat dalam Stranas PK. Jika dilihat dalam dua dimensi penyusun risiko korupsi yaitu dampak korupsi mempunyai rerata 4.00 dan pada potensi korupsi sebesar 3.96. Ini menandakan potensi dan dampak korupsi masih dinilai sangat tinggi. Dengan kata lain, risiko korupsi yang terdapat dalam tiga fokus area Stranas PK dianggap sangat tinggi.

PARTISIPASI MASYARAKAT



partisipasi masyarakat sipil masih dianggap sangat rendah. Partisipasi masyarakat yang terdiri dari akses dan kapasitas masyarakat sipil dinilai sangat rendah. Di mana akses masyarakat sipil terhadap kebijakan antikorupsi, Stranas PK khususnya hanya 2.00 poin. Namun pada sisi kapasitas masyarakat sipil dalam keterlibatannya adalah mendapat 3.54 poin (cenderung tinggi). Maka bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Stranas PK dianggap masih cenderung tinggi.

DAMPAK ANTIKORUPSI



Namun masyarakat sipil menilai keberadaan dampak program antikorupsi pada posisi yang cenderung tinggi. Hal ini terlihat dari table diatas, meski masyarakat menilai program antikorupsi cenderung rendah (1.92), akan tetapi untuk capaian programnya dinilai sangat tinggi (4.00).

Potensi Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Keuangan Negara
3.63	Penegakan Hukum dan RB

Akses Masyarakat

3.20	Perizinan & Tata Niaga
1.40	Keuangan Negara
1.40	Penegakan Hukum dan RB

Program Antikorupsi

2.00	Perizinan & Tata Niaga
1.75	Keuangan Negara
2.00	Penegakan Hukum dan RB

- Sangat Tinggi
- Cenderung Tinggi
- Cenderung Rendah
- Sangat Rendah
- Tidak Ada

Dampak Korupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Keuangan Negara
4.00	Penegakan Hukum dan RB

Kapasitas Masyarakat

3.38	Perizinan & Tata Niaga
3.36	Keuangan Negara
3.36	Penegakan Hukum dan RB

Capaian Program Antikorupsi

4.00	Perizinan & Tata Niaga
4.00	Keuangan Negara
4.00	Penegakan Hukum dan RB

